

**PENGARUH KOMPETENSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI DESA KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO**

Talita Christin Sigit, Arison Nainggolan, Rike Yolandan Panjaitan

Prodi Akuntansi, Universitas Methodist Indonesia

Email: Talitachristin924@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to investigate how competence, internal control, and community involvement affect the accountability of village fund management, with the application of information technology acting as a moderating factor in Kabanjahe District, Karo Regency. A quantitative descriptive approach was employed. Data analysis involved descriptive statistics, including tests for validity, reliability, classical assumptions, multiple linear regression, hypothesis testing, and moderation regression analysis (MRA) using SPSS version 26. The results reveal that both competence and internal control positively and significantly influence village fund accountability on a partial basis, whereas community participation does not show a significant or positive effect. Additionally, the MRA results indicate that information technology effectively moderates the relationship between competence and accountability, but does not moderate the effects of internal control or community participation on accountability.

Keywords: Competence, Internal Control, Community Participation, Accountability in Village Fund Management, Utilization of Information Technology

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan analisis regresi moderasi (MRA) menggunakan SPSS versi 26. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial, sementara partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan dan positif. Uji MRA juga menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun tidak dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Kompetensi, Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Dana desa adalah instrumen penting pemerintah Indonesia untuk mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 (Ridwan et al., 2023). Dana untuk desa berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung pendapatan serta pengeluaran desa, lalu

dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut dimanfaatkan guna mendanai kegiatan pemerintahan, pengembangan serta penguatan masyarakat, dan juga untuk pengembangan desa. Administrasi dana desa diawali dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan tanggung jawab keuangan desa.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, serta secara disiplin dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 perihal Desa, desa mendapatkan hak dari pemerintah untuk mengelola dana desa secara mandiri guna menggali potensi lokal dan guna memperbaiki taraf hidup serta kesejahteraan warga desa. Dalam PMK No 201/PMK.07/2022, jumlah dana desa yang diperoleh oleh tiap desa bervariasi, dengan alokasi dana desa ditentukan sesuai Alokasi Dasar dan Alokasi Formula, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta luas wilayah, dengan tetap mempertimbangkan prinsip pemerataan dan keadilan.

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Kabanjahe, berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai isu terkait sasaran prioritas dari anggaran dana desa yang kurang tepat seperti kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di beberapa desa yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan dalam desa tersebut dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Lemahnya pengendalian internal terlihat dari minimnya transparansi pelaporan seperti beberapa desa tidak memasang baliho yang menjelaskan penggunaan dana desa. Keterbukaan yang kurang antara pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan masyarakat menjadi masalah yang terjadi dari tahap perencanaan hingga tahap akhir pertanggungjawaban. Sehingga hal tersebut mengakibatkan masih terdapat desa yang masih berstatus berkembang pada kecamatan tersebut. Keterbatasan faktor-faktor terhadap akuntabilitas ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dana desa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Dalam anggaran desa yang besar, pengelolaan dana desa membutuhkan aspek

governance yang baik, di mana akuntabilitas merupakan salah satu pilar utamanya. Menurut Imbaruddin (2019), akuntabilitas merupakan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atas hasil kinerjanya dan anggaran yang dilaksanakannya. Santoso (2022) mengungkapkan akuntabilitas dapat tercapai secara maksimal jika sistem akuntansi dapat menyajikan informasi yang akurat, terpercaya, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat berbagai komponen yang memengaruhi pengelolaan dana desa.

Kompetensi merupakan komponen yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Meoheriono (2018), kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, kapabilitas, serta prinsip pribadi yang dibentuk melalui pengalaman serta proses pendidikan, sehingga seseorang mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan efektif, efisien, dan profesional. Aparat desa yang kompeten dapat meminimalisir penyelewengan yang dapat timbul dalam mengelola dana desa. Pahlawan dkk. (2020) berpendapat kompetensi aparat desa dianggap krusial guna memperbaiki transparansi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat yang kompeten cenderung memiliki pengetahuan lebih berkualitas, sehingga mampu menjalankan pengelolaan desa secara terstruktur dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Komponen lain yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah penerapan pengendalian internal yang efektif di pemerintahan desa. Pengendalian internal yang dijalankan aparat berperan dalam membangun kepercayaan serta mendukung pencapaian tujuan pemerintah desa melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penghematan biaya. Husain dkk. (2023) berpendapat bahwa pengendalian internal yang kuat dapat menjamin keakuratan pelaporan keuangan Desa, keamanan aset Desa, dan kepatuhan Undang-Undang. Melalui penerapan

pengendalian internal yang efektif, pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Selain kompetensi dan pengendalian internal, terciptanya akuntabilitas harus didukung oleh partisipasi masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam definisi akuntabilitas, yaitu tanggung jawab pimpinan desa kepada masyarakat dan peran masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa diperlukan. Aurelia et al. (2023) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dapat mengurangi penyimpangan dari pengelolaan dana dan mengurangi penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

Faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel tersebut adalah variabel penggunaan teknologi informasi, yang akan memainkan peran moderasi yang akan meningkatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ice et al. (2023), teknologi informasi merujuk pada teknologi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan, mengelola, menyimpan, menyampaikan, serta mendistribusikan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan komponen penting yang dapat memperkuat kompetensi aparat desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. pelaksanaan teknologi informasi seperti aplikasi SISKEUDES telah mengubah pendaftaran keuangan manual menjadi sistem digital yang lebih akurat dan efisien. Dampak moderasi TI terhadap akuntabilitas dapat dilihat dalam tiga bidang utama: pelaporan keuangan yang lebih akurat dengan lebih sedikit kesalahan dan ketersediaan jejak audit digital, akuntabilitas program yang lebih terukur melalui pelacakan KPI yang sistematis, dan peningkatan akuntabilitas administratif melalui manajemen dokumen yang lebih terorganisir. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, diperlukan prasyarat penting, seperti pelatihan berkelanjutan kepala desa, infrastruktur teknologi yang memadai,

pemeliharaan rutin, prosedur operasi standar yang jelas, dan sistem keamanan data yang terjamin. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, teknologi informasi dapat secara efektif mempererat hubungan antara kompetensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan menjadi variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini dapat diketahui dalam berbagai aspek pengendalian internal seperti pemanfaatan sistem kebijakan digital yang memungkinkan akses cepat ke kebijakan terbaru dan update otomatis ke seluruh perangkat, serta platform komunikasi terintegrasi untuk sharing informasi real-time dan dokumentasi otomatis. Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian internal membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, kompetensi SDM melalui pelatihan, serta kebijakan dan prosedur yang jelas. Suatu desa yang berhasil mengimplementasikan sistem pengendalian internal berbasis teknologi yang terintegrasi menghasilkan peningkatan akurasi pengelolaan keuangan, percepatan proses administrasi, dan penguatan transparansi serta akuntabilitas.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi variabel moderasi pada hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui dukungan teknologi informasi, masyarakat dapat berperan lebih aktif pada seluruh proses pengelolaan dana desa, diawali perencanaan, penerapan, hingga penilaian. Dampak moderasi pemanfaatan teknologi informasi yaitu dimana masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah desa secara real-time dan memungkinkan koordinasi antar lembaga desa lebih efektif. Menggunakan website interaktif, aplikasi mobile desa dan media sosial terintegrasi memungkinkan dapat untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi. Efektivitas teknologi informasi

dalam memperkuat hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa didukung oleh infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, dan komitmen pemerintah desa dalam keterbukaan informasi. Hasilnya terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, monitoring, dan pengawasan anggaran, serta penguatan akuntabilitas melalui transparansi informasi dan kemudahan akses data.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Theory Stewardship

Teori *Stewardship* didasarkan pada psikologi dan sosiologi, didesain guna menjelaskan kondisi di mana manajer penghargaan dan tindakan memprioritaskan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu mereka (Davis & Donaldson, 1997). Teori ini menunjukkan bahwa manajemen memiliki kebutuhan berbagai entitas, sehingga terbentuk keterkaitan kuat guna keberhasilan organisasi dan tingkat kepuasan pelanggan, yang memungkinkan untuk memaksimalkan tujuan organisasi (Budiana et al., 2019). *Theory Stewardship* menggambarkan bahwa organisasi sektor publik, termasuk pemerintah desa, seharusnya menjadi entitas yang andal, mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, menyediakan layanan yang berkualitas tinggi, serta bertanggung jawab atas setiap layanan yang mereka berikan (Adhyana, 2022).

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mardiasmo (2021) mengemukakan akuntabilitas adalah tugas pemegang amanah (*steward*) untuk bertanggung jawab, mewakili, melaporkan, dan menjelaskan seluruh kegiatan dan kegiatan yang berada dalam tanggung jawab pemerintah, yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut. Supadmi & Suputra (2018) menyatakan tanggung jawab atas pengelolaan dana desa berada di tangan pemerintah desa, dengan syarat bahwa dana

tersebut dikelola sesuai prosedur, kebijakan, serta ketentuan hukum yang berlaku, dan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan.

3. Kompetensi

Widyatama et al. (2017), berpendapat kompetensi adalah keterampilan seseorang yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan. Mualifu dkk (Mualifu et al., 2019) berpendapat bahwa kompetensi adalah kemampuan individu guna melakukan kewajiban berdasarkan kriteria organisasi negara, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di tempat kerja.

4. Pengendalian Internal

Keputusan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal (SPI) didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh personel organisasi guna memastikan tercapainya tujuan, guna menjamin tercapainya sasaran organisasi melalui kegiatan operasional yang efisien dan efektif, penyusunan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta kepatuhan pada aturan yang berlaku. Budiana dkk (2019) menyatakan pengendalian internal adalah seperangkat prosedur sistematis yang konsisten dengan aturan pemantauan kinerja organisasi.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi merupakan alat utama untuk membantu pekerja mengelola sumber daya perusahaan berupa informasi yang susun dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan guna menyediakan layanan optimal bagi masyarakat (Aulia, 2018). Menurut UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik, "Teknologi informasi adalah teknik pengumpulan, persiapan, penyimpanan, pengolahan, pengumuman, analisis, dan/atau penyebarluasan informasi."

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasinya terdiri dari sekretaris, KASI, KAUR, BPD dan KADUS dari 8 desa di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Berdasarkan persyaratan tertentu, metode purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dan *moderate regression analysis* diolah menggunakan SPSS 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Pengambilan data dilakukan melalui peredaran kuesioner kepada responden. Objek penelitian mencakup semua perangkat desa delapan desa di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan total responden sebanyak 64 orang.

Tabel 1 Deskripsi Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	81	100%
Kuesioner yang tidak kembali	17	21%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	-	-
Kuesioner yang memenuhi syarat	64	79%

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi	64	6	24	30	27,72	1,838
Pengendalian Internal	64	6	24	30	28,28	2,186
Partisipasi Masyarakat	64	5	20	25	23,42	1,572
Akuntabilitas	64	7	28	35	32,94	2,054
Pengelolaan Dana Desa	64	5	20	25	23,42	1,572
Pemanfaatan Teknologi	64					
Informasi	64					
Valid N (listwise)	64					

Sumber: Olah data SPSS 26, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah responden (N) sebanyak 64 orang dan dapat diperoleh nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi. Variabel kompetensi memperlihatkan bahwa nilai minimum responden sebesar 24, dan nilai maksimum sebesar 30. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,72 dengan standar deviasi sebesar 1,838. Variabel

pengendalian internal menunjukkan nilai minimum sebesar 24 dan maksimum sebesar 30, dengan rata-rata (*mean*) 28,28 serta standar deviasi 2,186. Untuk variabel partisipasi masyarakat, nilai minimum tercatat sebesar 20 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata 23,42 dan standar deviasi 1,572. Sementara itu, variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum 28 dan maksimum 35, dengan rata-rata 32,94 dan standar deviasi 2,054. Terakhir, variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai minimum sebesar 20 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata 23,42 serta standar deviasi sebesar 1,572.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana kuesioner tersebut valid. Ini menentukan apakah pertanyaan atau pernyataan mampu menguraikan tolok ukur variabel penelitian. Item pernyataan dinyatakan valid jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai pada signifikansi 0,05. Nilai t_{tabel} dalam penelitian ini dapat ditetapkan dengan melihat $t_{tabel} n=64$ atau $df=n-2=62$ dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,2461.

Tabel 3 Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kompetensi	X1.1	0,521	0,2461	Valid
	X1.2	0,648	0,2461	Valid
	X1.3	0,709	0,2461	Valid
	X1.4	0,621	0,2461	Valid
	X1.5	0,676	0,2461	Valid
	X1.6	0,474	0,2461	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X2.1	0,778	0,2461	Valid
	X2.2	0,855	0,2461	Valid
	X2.3	0,848	0,2461	Valid
	X2.4	0,810	0,2461	Valid
	X2.5	0,778	0,2461	Valid
	X2.6	0,817	0,2461	Valid
Partisipasi Masyarakat	X3.1	0,663	0,2461	Valid
	X3.2	0,792	0,2461	Valid
	X3.3	0,654	0,2461	Valid
	X3.4	0,541	0,2461	Valid
	X3.5	0,522	0,2461	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y.1	0,739	0,2461	Valid
	Y.2	0,671	0,2461	Valid
	Y.3	0,725	0,2461	Valid
	Y.4	0,475	0,2461	Valid
	Y.5	0,642	0,2461	Valid
	Y.6	0,722	0,2461	Valid
	Y.7	0,656	0,2461	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Z.1	0,723	0,2461	Valid
	Z.2	0,658	0,2461	Valid
	Z.3	0,636	0,2461	Valid
	Z.4	0,680	0,2461	Valid
	Z.5	0,660	0,2461	Valid

Sumber: Olah data SPSS 26, 2025

Tabel 3 diatas memperlihatkan dari pengujian perhitungan atau pengukuran validitas kuesioner penelitian diperoleh seluruh pertanyaan dianggap valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikan 5%. Setiap pertanyaan dalam variabel memiliki nilai koefisien korelasi yang melebihi r_{tabel} sebesar 0,2461 sehingga semua item dalam kuesioner dinyatakan valid.

Reliabilitas

Sebuah kuesioner dinyatakan reliabel apabila respon yang diberikan individu terhadap pertanyaan tetap tetap stabil pada waktu ke waktu. Perhitungan nilai *Cronbach Alpha* dilakukan untuk menilai kehandalan variabel dari masing-masing instrumen. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* yang dihasilkan melebihi 0,60, yang menandakan bahwa variabel tersebut memiliki konsistensi internal yang cukup stabil.

Tabel 4 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan
Kompetensi (X1)	0.640	0.60	Reliabel
Pengendalian Internal (X2)	0.898	0.60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.635	0.60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.781	0.60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	0.696	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Tabel 4 memperlihatkan nilai *Cronbach Alpha* dari setiap variabel lebih besar dari 0,60, sehingga seluruh instrumen pada penelitian telah memenuhi standar reliabilitas atau sudah *reliable* (konsisten).

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna memastikan bahwa data variabel bebas dan terikat pada model regresi memiliki distribusi yang bersifat normal. Uji normalitas pada penelitian dilakukan dengan menggunakan *uji Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan memeriksa nilai signifikansi yang dihasilkan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal.

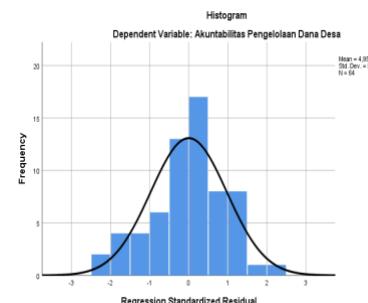
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1198554
	Std. Deviation	1,64056630
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,054
	Negative	-,093
Test Statistic		,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

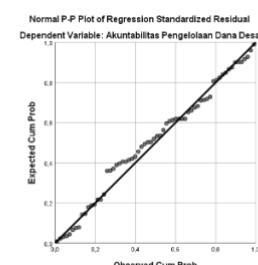
Tabel 5 memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dianggap berdistribusi normal. Hasil tersebut juga dapat dilihat dari grafik histogram yang dihasilkan dalam uji normalitas dalam gambar berikut:



Gambar 1. Grafik Histogram

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2025

Grafik tersebut terlihat bahwa bentuk histogram tidak menjorok ke kiri maupun ke kanan, yang mengindikasikan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Distribusi yang simetris seperti ini mencerminkan bahwa penyebaran data mendekati distribusi normal.



Gambar 2. Normal P-P Plot

Sumber: Olah data SPSS 26, 2025

Gambar tersebut memperlihatkan titik-titik menyebar disekitar sumbu diagonal grafik dan penyebarannya tidak terlalu

jauh. Pola ini memperlihatkan data sudah memenuhi asumsi distribusi normal, sehingga model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dianggap sesuai dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Pemeriksaan terhadap gejala multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai *tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dianggap tidak mengalami multikolinearitas jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	Kompetensi	,819
	Pengendalian Internal	,814
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,983

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output diolah SPSS 26, 2025

Tabel 6 menunjukkan variabel independen memiliki nilai *tolerance* dari setiap variabel independen lebih dari 0,10 dengan total *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Karena itu, dapat dikatakan persamaan model regresi tidak mengalami multikolinearitas, artinya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk analisis tambahan.

Analisis Regresi Berganda

Analisis dilakukan guna mengetahui besarnya koefisien regresi dan tingkat signifikansinya, yang menjadi acuan dalam menilai validitas hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12,090	4,547		2,659	,010
	Kompetensi	,459	,129	,411	3,557	,001
	Pengendalian Internal	,256	,109	,272	2,346	,022
	Partisipasi Masyarakat	,038	,138	,029	,273	,786

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output diolah SPSS 26, 2025

$$\text{APDD} = 12,090 + 0,459 \text{ KO} + 0,256 \text{ PI} + 0,038 \text{ PM} + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh bahwa konstanta dari Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 12,090 berarti bahwa nilai variabel bebas adalah 0, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa akan berada pada angka 12,090. Koefisien kompetensi sebesar 0,459 mengimplikasikan bahwa tambahan kompetensi sebesar satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,459. Selanjutnya, koefisien pengendalian internal sebesar 0,256 menandakan tambahan satu satuan dalam pengendalian internal akan menaikkan akuntabilitas sebesar 0,256. Serta, koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,038 menunjukkan tiap peningkatan satu satuan dalam partisipasi masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas sebesar 0,038.

Uji Parsial (Uji-t)

Penilaian pada uji ini ditentukan berdasarkan t_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} . Jika total signifikan kurang dari 0,05 dan t_{hitung} melebihi t_{tabel} , variabel independen dianggap berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis dapat diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12,090	4,547		2,659	,010
	Kompetensi	,459	,129	,411	3,557	,001
	Pengendalian Internal	,256	,109	,272	2,346	,022
	Partisipasi Masyarakat	,038	,138	,029	,273	,786

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Olah data SPSS 26, 2025

Pengujian hipotesis variabel kompetensi (X1) didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 3,557 dengan signifikansi 0,001 dengan nilai koefisien 0,459 yakni bernilai positif. Ini menandakan bahwa secara parsial, variabel kompetensi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Pengujian hipotesis variabel pengendalian internal (X2) didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 2,346

dengan signifikansi 0,022 dengan nilai koefisien 0,256 yakni bernilai positif. Hal ini menandakan bahwa secara parsial, variabel pengendalian internal berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Y). Pengujian hipotesis variabel partisipasi masyarakat (X3) didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 0,273 dengan signifikansi 0,786 dengan nilai koefisien 0,038 yakni bernilai positif. Pernyataan tersebut menandakan bahwa secara parsial, partisipasi masyarakat tidak memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Y)

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) merupakan uji berganda khusus yang didalamnya terdapat unsur interaksi antar variabel independen dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana peran variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-20,975	60,182		-.349	,729
Kompetensi	-4,539	2,072	-4,063	-,033	2,190
Pengendalian Internal	2,308	1,567	2,456	1,473	,146
Partisipasi Masyarakat	4,782	2,960	3,333	1,615	,112
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,216	2,575	,930	,472	,639
X1M	,213	,089	6,671	2,401	,020
X2M	-,096	,068	-3,329	-,161	1,421
X3M	-,184	,122	-4,557	-,137	1,508

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

$$\text{APDD} = -20,975 - 4,539 \text{ KO} + 2,308 \text{ PI} + 4,782 \text{ PM} + 1,216 \text{ PTI} + 0,213 \text{ KO*PTI} - 0,096 \text{ PI*PTI} - 0,184 \text{ PM*PTI} + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi tersebut diperoleh pengujian Moderated Regression Analysis (MRA), interaksi antara kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,401 dengan tingkat signifikansi 0,020. Karena nilai t_{hitung}

melebihi t_{tabel} ($2,401 > 2,003$) dan nilai signifikansi berada di bawah 5% ($0,020 < 0,05$), serta koefisien regresi positif sebesar 0,213, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, pengujian interaksi antara pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan t_{hitung} sebesar -1,421 dengan signifikansi 0,161. Karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,421 < 2,003$) dan nilai signifikansi melebihi 5% ($0,161 > 0,05$), serta koefisien regresi negatif sebesar -0,096,]disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pengendalian internal dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan untuk interaksi antara keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi, diperoleh t_{hitung} sebesar -1,508 dengan signifikansi 0,137. Karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,508 < 2,003$) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5% ($0,137 > 0,05$), serta koefisien bernilai negatif sebesar -0,184, disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berperan sebagai moderator pada hubungan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji-t variabel kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai positif dan signifikan, yaitu kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat desa yang berpengetahuan mengelola dana desa akan mampu meningkatkan akuntabilitas. Keterampilan, keahlian, serta pengetahuan aparatur desa pada pengelolaan keuangan desa

menentukan kompetensi dari perangkat desa. Penelitian ini selaras dengan penelitian Nela Safelia (2023), Sari (2024) (Deviyanti) dan Wati (2022), yang menemukan kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua dinyatakan diterima karena hasil uji t variabel pengendalian internal terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil pengolahan data memperlihatkan nilai yang signifikan dan positif, menandakan pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keberadaan pengendalian internal menjadi krusial pada proses administrasi keuangan desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jika kontrol internal ketat, risiko kesalahan dan penipuan sangat rendah. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan pengendalian internal dengan baik. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian oleh Husain dkk (2023), Tobing dkk (2022) dan Indriasisih dkk (2022), menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga ditolak karena hasil uji t, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini karena masyarakat tidak sepenuhnya diwakili dalam pemerintahan desa Kecamatan Kabanjahe. Keterlibatan masyarakat dan BPD sangat penting guna keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Namun, tidak

selalu BPD berperan aktif pada tahapan pelaksanaan pemerintah desa, terutama dalam proses penyusunan anggaran desa. Penelitian ini selaras dengan penelitian Nurkhasanah (2019) dan Indraswari (2021), berpendapat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis keempat diterima berdasarkan hasil analisis regresi moderasi (MRA) yang memperlihatkan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dikarenakan, kompetensi yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi memudahkan kerja perangkat saat mengelola dana desa, maka mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan pelaporan, serta meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan. Perangkat desa yang kompeten, didukung oleh teknologi informasi, dapat lebih mudah mempublikasikan informasi keuangan desa melalui website desa, media sosial, atau aplikasi khusus yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kondisi ini mengarah pada rilis informasi yang mempromosikan pengawasan publik dan meningkatkan akuntabilitas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kelima dinyatakan ditolak karena hasil analisis regresi moderasi (MRA) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor terkait lemahnya penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian internal, baik di

tingkat pengendalian internal umum maupun khusus. Pengendalian yang seharusnya mencakup validitas, pemberian, kelengkapan, peringkat, klasifikasi, ketepatan waktu, dan representasi yang akurat belum berjalan optimal. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Ice et al. (2023), berpendapat pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis keenam ditolak karena hasil analisis regresi moderasi (MRA) mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketidakmampuan teknologi informasi dalam mempengaruhi keterlibatan masyarakat pada pengelolaan dana desa menandakan teknologi tersebut tidak sesuai karakteristik dengan kebutuhan warga desa. Dikarenakan, banyak warga negara tidak memiliki akses, keterampilan, atau kebiasaan untuk menggunakan teknologi informasi dengan cara yang sama, seperti orang tua, orang berpendidikan rendah atau kelompok ekonomi rentan yang menghadapi hambatan dalam menggunakan *platform digital*. pernyataan ini sejalan terhadap penelitian Ice dkk (2023), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu sebagai variabel moderasi dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan variabel kompetensi dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun,

partisipasi masyarakat menunjukkan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu memoderasi hubungan antara kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun tidak berperan menjadi variabel moderasi dalam pengaruh pengendalian internal maupun partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. G. P. (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 48–61. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2518>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa FEB*, 1(3), 1–15.
- Aurelia, D., Sudirman, R., & Hapid, H. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16183>
- Budiana;; D. A. D. S. N. (2019). The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, VII(I).

- Davis, J. H., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(21), 36–48. <https://balipost.com>
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Ice, M. N., Ardini, L., & Kurnia. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7.
- Imbaruddin, A. (2019). *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja*. Makassar: Deepublish.
- Indraswari, N. E. Y. R. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.
- Indriasiyah, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan
- Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing „Goodwill”*, 106–15.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 53(9), 1689–1699. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10203/1/skripsi lengkap.pdf>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL Volume 2, NUMBER 2, YEAR 2020*, 2.
- PERDANA, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.
- Santoso, L., Suprihati, S., & Ningsih, S. (2022). The Effect Of Village Apparatus Competence, Internal Control System, And Organizational Commitments On Village Fund Management Accountability (Case Research in Banyudono District). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1233–1243. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6236>
- Sari, U. F. Y. D. W. M. S. (2024). Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada

- Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Supadmi, N. L. D. . D. S. (2018). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar*. 13.
- Tobing, D., Simanjuntak, A., Sipayung, T. D., & Siahaan, S. B. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Hutatoruan IV, Desa Hutaturoan I, Huta*. 8, 71–84.
- Yuda Andika, I. B. A., & Erlina Wati, N. W. A. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 340–350.
<https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2023>